

STRATEGI KEPALA DESA KARANGAGUNG DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN ALUN-ALUN

Siska Ulfatin Nada

(PPKn, FISH, UNESA) siska.17040254037@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari

(PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Desa Karangagung merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Karangagung berbatasan langsung dengan pantai utara sehingga mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai nelayan. Masih banyak dari masyarakat Desa Karangagung memiliki kesejahteraan rendah karena menggantungkan hidupnya dari hasil laut, karena itu pemerintah desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Kepala Desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun, serta mendeskripsikan dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangagung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Karangagung, perangkat desa, dan staff Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai informan pendukung. Hasil temuan dalam penelitian memperlihatkan strategi Kepala Desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya, pengelolaan alun-alun oleh BUMDES Bahari Sejahtera, pembentukan pengurus serta penyediaan tempat pemberdayaan, perencanaan program melalui musyawarah dengan masyarakat, penyuluhan terhadap target pemberdayaan mengenai pengelolaan ruko, implementasi program pemberdayaan dan evaluasi setiap minggu. Dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program tersebut, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti program, selain itu dari data yang didapat dari kantor Desa Karangagung terdapat 90% masyarakat turut serta dalam musyawarah terkait pembangunan dan perencanaan program yang ada di alun-alun desa.

Kata Kunci: strategi, pemberdayaan, masyarakat.

Abstract

Karangagung Village is one of the villages in Tuban Regency, East Java Province. Geographically, Karangagung Village is directly adjacent to the north coast so that the majority of the villagers work as fishermen. There are still many of the people of Karangagung Village who have low welfare because they depend on marine products for their lives, therefore the village government seeks to improve community welfare through community economic empowerment programs. This study aims to describe the strategy of the Karangagung Village Head in empowering the community's economy through the management of the square, and to describe the community's support for the empowerment program carried out by the Karangagung Village Head. The approach used in this research is qualitative with descriptive design. Data obtained through observation and interviews. The research subjects were the Karangagung Village Head, village officials, and Village Owned Enterprises (BUMDES) staff as supporting informants. The findings in the study showed the strategies of the Karangagung Village Head in empowering the community's economy including, the management of the square by BUMDES Bahari Sejahtera, the formation of administrators and the provision of empowerment places, program planning through consultation with the community, counseling on empowerment targets regarding shophouse management, implementation of empowerment programs. and evaluation every week. Community support for the empowerment program carried out by the village head in this study shows that the community is very enthusiastic about the program, this can be seen from the community's participation in participating in the program, in addition to data obtained from the Karangagung Village office there are 90% of the community participating in deliberation related to the development and planning of existing programs in the village square.

Keywords: strategy, empowerment, community.

PENDAHULUAN

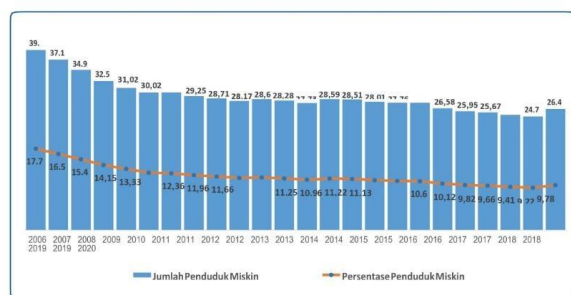
Indonesia merupakan negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai bangsa yang merdeka, tentu saja Indonesia memiliki cita-cita nasional, yang termuat

dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang berbunyi, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentu saja membutuhkan banyak sekali upaya dan dukungan baik dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Namun, kemiskinan masih menjadi faktor utama dalam menghambat cita-cita nasional tersebut. Tidak meratanya pembangunan dan pendidikan mengakibatkan masih banyak sekali rakyat Indonesia yang memiliki kesejahteraan rendah serta pendidikan yang kurang baik.

Fenomena kemiskinan merupakan suatu yang biasa terjadi pada kehidupan masyarakat, khususnya pada beberapa negara berkembang diantaranya Indonesia. Kemiskinan banyak dijumpai di negara berkembang karena rata-rata negara berkembang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, selain itu meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mengakibatkan banyak dari masyarakat yang tidak memiliki penghasilan yang layak. Berdasarkan pendapat Parsudi Suparlan dalam Hamdar Arraiyah (2010:1) kemiskinan tidak akan muncul dengan sendirinya, disamping adanya faktor lain, melainkan terbentuk sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang ada pada keseharian manusia, faktor yang paling berpengaruh ialah sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode September 2019 – Maret 2020 diantaranya adalah pandemi covid 19 yang menyebabkan pengurangan jumlah karyawan pada sejumlah perusahaan di Indonesia sehingga banyak orang yang mendapatkan putus hubungan kerja dari tempat kerja, menurunnya jumlah pengunjung pada sektor pariwisata di Indonesia, pada periode September 2019 – Maret 2020, secara nasional harga beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, seperti beras, daging, minyak goreng, dan sebagainya.

Gambar 1. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin,



2006- Maret 2020

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat memiliki kewajiban untuk memastikan setiap rakyatnya memiliki kehidupan yang layak. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu pada masa pandemi covid 19 yang menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 banyak sekali dari masyarakat yang terkena putus hubungan kerja sehingga banyak dari mereka yang menjadi pengangguran, hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat karena masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Kemiskinan ialah salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh negeri ini. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesenjangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, serta tidak meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena itu pemberdayaan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat rentan dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik, sehingga kesejahteraan akan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa terbentuk sendiri melainkan membutuhkan aspek-aspek pendukung diantaranya adalah sosial dan ekonomi. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, karena dengan adanya lapangan pekerjaan yang bervariasi maka masyarakat akan memiliki usaha alternative untuk menghindari kehancuran usaha.

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu hal yang dicantumkan dalam tujuan negara yaitu termuat dalam Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut isi dari UUD 1945 pasal 327 adalah: “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian misi pokok dari ekonomi kerakyatan adalah menyediakan lapangan pekerjaan dan berupaya meningkatkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan rakyatnya memiliki kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk memberdayakan kelompok rentan, dalam hal ini ialah masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi rendah agar mampu memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, serta dapat mempunyai peran aktif dalam masyarakat. Pada desa Karangagung, mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan dimana mereka menggantungkan hidup dari pendapatan yang tidak pasti sehingga mereka termasuk kedalam kelompok rentan secara ekonomi,

karena itu diperlukan adanya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam memberdayakan kelompok rentan dalam masyarakat yang memiliki kesulitan ekonomi, sedangkan sebagai tujuan pemberdayaan merupakan suatu hasil yang ingin dicapai dalam proses tersebut.

Pemberdayaan bukanlah sesuatu yang terbentuk sendiri secara alami melainkan melalui berbagai proses yang membentuk pemberdayaan tersebut. Menurut Pranaka (1996:137) tahapan dalam kegiatan pemberdayaan membutuhkan sikap aktif subyek untuk mengetahui sumber yang mempunyai daya subjek dengan memberi peluang untuk pengembangan diri sebelum akhirnya objek tersebut beralih fungsi menjadi objek yang baru. Subyek sebagai faktor eksternal atau stimulus dari luar, dan obyek yang menjadi faktor internal dalam melakukan tindakan sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Subyek pemberdayaan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sedangkan obyek adalah masyarakat yang akan diberdayakan.

Berdasarkan pendapat Edi Suharto (2005:58-60) pemberdayaan menunjukkan pada kapasitas orang, dengan khusus golongan lemah dan rentan hingga mereka mempunyai kekuatan kapasitas pada: (a) mencukupi keperluan primernya hingga mereka mempunyai kebebasan (*freedom*) atau kekuatan, kebebasan bukan dalam artian bebas dalam mengeluarkan pendapat, akan tetapi bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan. (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat kelompok lemah agar mampu mengembangkan potensi diri serta memenuhi kebutuhan hidup. Edi Suharto juga menyebutkan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dalam kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Menurut Widjajanti (2011) pemberdayaan memerlukan pengembangan modal manusia, dan akan lebih baik lagi apabila pemberdayaan didukung oleh pengembangan pelaku pemberdayaan itu sendiri.

Desa Karangagung merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa

Timur. Secara geografis Desa Karangagung berbatasan langsung dengan pantai utara pulau Jawa sehingga mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai nelayan. Dari 10.138 jumlah total penduduk Desa Karangagung, terdapat 2.057 jumlah penduduk laki-laki yang bekerja sebagai nelayan, dan 1.734 penduduk perempuan sebagai ibu rumah tangga, sehingga apabila diperentasikan terdapat kurang lebih 40% penduduk yang tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena mayoritas penduduk yang bekerja sebagai nelayan menggantungkan hidup pada hasil laut yang tidak menentu setiap harinya, selain itu pada saat air laut pasang para nelayan tidak dapat bekerja sehingga mereka tidak akan mendapat penghasilan pada hari itu. Melihat hal tersebut kepala desa Karangagung berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui pembangunan alun-alun, dimana para masyarakat diberikan lahan untuk berdagang, sehingga masyarakat akan memiliki penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan diharapkan dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Kapita (2017) adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, serta kegiatan lain yang dapat menunjang kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu dalam membangun masyarakat desa terutama dibidang sosial ekonomi dibutuhkan pemimpin, yang dalam hal ini adalah kepala desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki wewenang untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, salah satunya adalah dengan merencanakan kesejahteraan bagi warganya.

Pelaksanaan rumah tangga desa tidak terlepas dari peran kepala desa. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban untuk menjalankan rumah tangga desa nya. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 6, kepala desa memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut, 1.) kepala desa berkedudukan sebagai kepala desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, 2.) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, 3.) untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat dua, kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dan lembaga lain. Berdasarkan pasal tersebut, upaya yang dilakukan oleh kepala Desa Karangagung untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun.

Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang biasa digunakan masyarakat dalam berbagai aktifitas yang beragam. Menurut Susanti (2015) Alun-alun merupakan salah satu bentuk ruang publik tradisional, alun-alun merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional yang kaya akan makna dan kajian filosofis. Setiap aspek yang muncul ada alun-alun tradisional selalu dikaitkan dengan tiga aspek yaitu kultur, kosmos, dan kuasa. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian terpenting dalam pembangunan alun-alun. Menurut Haryoto (1986:286), pada dasarnya alun-alun itu halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana, camat dan bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikhwal militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan. Karena itu alun-alun bisa beralih fungsi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk sekedar berolahraga, menghabiskan waktu luang.

Pemanfaatan alun-alun Desa Karangagung sendiri dijadikan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima, serta tempat berlangsungnya acara yang diadakan oleh pemerintah desa seperti senam bersama dan sebagainya. Alun-alun desa Karangagung diresmikan oleh Bupati Tuban pada 27 Oktober 2020, yang disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tuban, Camat, Forkopimka Palang, serta Kepala desa dan perangkat desa Karangagung. Menurut Kepala desa Karangagung, adanya alun-alun diharapkan menjadi ikon desa yang menggambarkan warga yang bekerja sebagai nelayan, selain itu adanya alun-alun juga mampu meningkatkan perekonomian warga.

Alun-alun desa Karangagung menjadi peluang usaha bagi sebagian masyarakat untuk berjualan. Pemerintah desa melalui BUMDES berupaya memberdayakan masyarakat asli desa Karangagung untuk mendirikan usaha melalui berjualan di alun-alun. Hal ini menjadikan masyarakat yang mulanya hanya menggantungkan pendapatan sebagai nelayan, memiliki usaha sampingan sebagai pedagang, sehingga pendapatan masyarakat meningkat. terdapat kurang lebih 20 pedagang di alun-alun Desa Karangagung, menurut beberapa pedagang di alun-alun, mereka mendapat keuntungan yang cukup besar dari penjualan karena tempatnya yang strategis dan biaya sewa ruko yang sangat terjangkau. Karena itu adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pengelolaan alun-alun dinilai cukup berhasil karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut maka strategi kepala Desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun serta dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung menarik untuk diteliti.

METODE

Penelitian ini memakai rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong (2006) mengkaji tentang desain riset kualitatif ialah riset yang bertujuan untuk mengkaji fenomena mengenai apa yang teralami oleh subjek riset contohnya motivasi, persepsi, perilaku, secara holistik, tindakan, dan dengan cara deskripsi pada wujud bahasa dan kata-kata, dalam sebuah konteks khusus yang alamiah dan dengan mempergunakan sebuah metode ilmiah. Sedangkan pendekatan deskriptif merupakan desain penelitian yang memanfaatkan data-data kualitatif untuk selanjutnya dirangkai menjadi kata-kata yang mudah dipahami. Alasan menggunakan desain penelitian kualitatif karena riset ini mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam strategi kepala Desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian dideskripsikan dan disajikan dengan kata-kata.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Berdasarkan pendapat Nasution (2003:43) tempat riset mengacu pada definisi lokasi sosial yang karakteristiknya dari terdapatnya tiga elemen yakni pelaku, kegiatan dan tempat yang dapat diamati. Dari pendapat Nasution tersebut maka Desa Karangagung dirasa sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian karena memiliki tiga unsur tersebut, selain itu alasan memilih Desa Karangagung sebagai tempat riset dikarenakan Desa Karangagung diantaranya satu- satunya desa di Kabupaten Tuban yang memiliki alun-alun,

dimana alun-alun tersebut dijadikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Fokus riset ini adalah strategi kepala Desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun, yang dapat diketahui melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan pendapat Marrus (2002) strategi ialah suatu tahapan menentukan perencanaan para top manajemen yang mempunyai fokus pada sasaran jangka panjang perusahaan, dengan pembuatan rancangan suatu metode atau usaha seperti apa agar sasaran tersebut dapat diraih. Sedangkan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Chambers dalam Zubaedi (2013:24) adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep pemberdayaan lebih luas daripada sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mencegah kemiskinan lebih lanjut, namun pemberdayaan juga diharapkan mampu mengembalikan rasa percaya diri masyarakat agar mampu kembali bersaing dan menjalankan fungsinya serta memberikan aspirasi pada proses pembangunan. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Karangagung, perangkat desa, dan staff BUMDES sebagai informan pendukung.

Sumber data pada riset ini yaitu sumber data primer. Berdasarkan Uma Sekaran (2011) data primer ialah data yang merujuk kepada informasi yang didapat dari tangan pertama oleh peneliti yang berkenaan dengan variabel minat dalam sasaran spesifikasi studi, sumber data primer dapat didapat melalui wawancara atau observasi diantara peneliti dengan narasumber atau pada riset ini disebut subjek riset. Pada riset ini data primer diperoleh dari pengamatan langsung yang dilaksanakan di alun-alun Desa Karangagung serta wawancara yang dilakukan dengan subyek yaitu kepala Desa Karangagung dan salah satu staff BUMDES. Data primer dalam penelitian ini yang didapat melalui observasi diantaranya adalah profil Desa Karangagung, data jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, data sarana prasarana, data tingkat pendidikan masyarakat dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data berdasarkan pendapat Sugiyono (2015:308) yaitu tahapan yang paling penting pada riset dikarenakan sarannya pada riset ialah memperoleh data. Metode yang dipergunakan dalam menghimpun data pada riset ini ialah wawancara dan observasi. Pengamatan ini dilaksanakan dengan cara melaksanakan observasi secara langsung supaya menetapkan dan meninjau tempat riset, menelusuri subjek riset, membangun hubungan baik dengan subjek riset. Pengamatan yang dilaksanakan pada riset ini ialah dengan mengobservasi langsung aktifitas yang terdapat di alun-alun Desa Karangagung, guna menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan

wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur, yang mana peneliti akan menelusuri informasi yang telah disampaikan oleh subjek secara detail. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan subyek penelitian yaitu Kepala Desa Karangagung, dan staff BUMDES.

Teknik validasi data pada riset ini menggunakan teknik Triangulasi. Berdasarkan pendapat Bungin (2009:256) teknik keabsahan data memiliki tiga kriteria yaitu kredibilitas, ketekunan pengamatan, dan kepastian dengan teknik pemeriksaan audit kepastian. Kredibilitas dalam penelitian ini adalah dengan memperbandingkan jawaban yang diberikan oleh pemerintah desa baik kepala desa sendiri ataupun staffnya dengan pihak penerima program pemberdayaan yaitu masyarakat. Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya menekankan dan mencari jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian saja. Auditor dalam hal ini adalah dosen pembimbing.

Metode analisa yang dipakai pada riset ini menggunakan analisa data kualitatif interaktif mengikuti konsep dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984:14) kegiatan pada analisa data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, sampai datanya jenuh. Kejenuhan dan ukuran data diiringi dengan tidak didapatkan kembali informasi atau data baru. Kegiatan pada analisa data terdiri dari alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, melingkupi: penyajian data, reduksi data, dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kepala Desa Karangagung dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Alun-Alun

Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Desa Karangagung memiliki luas wilayah sebesar 2,05 km², secara geografis Desa Karangagung berbatasan langsung dengan laut lepas pulau Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Sedangkan menurut batasan regional, Desa Karangagung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Karangagung Barat, Karangagung Timur, dan Karangagung Tengah.

Desa Karangagung memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.138 jiwa, dengan persebaran penduduk diantaranya Karangagung barat sebanyak 2.939 jiwa,

karangagung tengah sebanyak 2.881 jiwa, dan karangagung timur sebanyak 4.208 jiwa. Dari 10.138 jiwa penduduk desa karangagung, terdapat 4.610 jiwa penduduk usia produktif dengan mata pencaharian yang beragam baik yang tergolong dalam pekerjaan formal seperti guru, pegawai negeri, dan dokter, serta pekerjaan non formal seperti buruh, pedagang, karyawan dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 40% penduduk Desa Karangagung yang tergolong dalam usia produktif dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Karangagung.

Berdasarkan dari data yang diambil dari kantor Desa Karangagung, ditemukan bahwa dari 4.610 jiwa penduduk Desa Karangagung usia produktif terdapat 2.062 penduduk mayoritas yang bekerja dalam sector nelayan/perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mata pecaharian di Desa Karangagung sudah beragam, namun masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dilihat dari pekerjaan. Mayoritas penduduk Desa Karangagung dapat dikatakan memiliki kesejahteraan yang rendah dilihat dari pekerjaan adalah karena masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari pekerjaan yang hasilnya tidak pasti setiap harinya, bahkan apabila air laut pasang pada musim hujan, banyak dari nelayan yang tidak bias melaut selama beberapa hari sehingga mereka tidak memiliki pendapatan sama sekali pada saat itu.

Kehidupan sosial masyarakat desa karangagung sudah dapat dikatakan modern, hal ini dapat dilihat dari luasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Karangagung, mudahnya akses masuk desa, serta sudah banyak mayoritas penduduk yang mampu menggunakan teknologi seperti gadget. Selain itu kecepatan jaringan internet yang stabil memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dari jejaring sosial yang mengakibatkan banyak adat atau tradisi yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat sekitar, seperti sedekah laut. Meskipun kehidupan sosial masyarakat mulai mengarah pada kehidupan modern, namun minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih sangat sedikit, hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	2.246
2.	Belum Tamat SD	1.396
3.	Tamat SD	2.879
4.	SLTP	2.100
5.	SLTA	2.166
6.	D1	18
7.	D3	69
8.	S1	374
9.	S2	13

Masyarakat Desa Karangagung menganggap bahwa pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang tidak terlalu penting. Hal ini dibuktikan dari masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi hanya sampai S2 sebanyak 13 orang. Masyarakat dengan jenjang pendidikan S1 sejumlah 374 orang, dan masyarakat yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang D3 hanya 69 orang. Dari hal tersebut ditemukan fakta bahwa meskipun kehidupan masyarakat desa karangagung sudah mengarah pada kehidupan modern, namun minat masyarakat untuk meneruskan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi masih sangat rendah. Rendahnya minat masyarakat desa karangagung untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang dapat dilihat dari tabel. 1 tersebut tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, namun faktor utama dari rendahnya minat masyarakat dalam menjalankan pendidikan tinggi adalah faktor ekonomi. Masih banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan adalah sesuatu yang buang-buang uang, meskipun tidak memiliki gelar sarjana anak-anak mereka masih bisa mendapatkan pekerjaan. Banyaknya masyarakat yang memiliki pemikiran tersebut mengakibatkan mayoritas masyarakat memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini juga membuktikan bahwa meskipun kehidupan sosial masyarakat desa karangagung sudah mengarah pada kehidupan modern, namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kebutuhan ekonomi yang sulit untuk dipenuhi.

Desa Karangagung merupakan salah satu desa yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi kepentingan masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut berupa sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana keagamaan, dan sarana prasarana umum. Sarana pemerintahan pada Desa Karangagung mempunyai kantor balai desa yang terletak di wilayah Karangagung Tengah. Sarana prasarana tersebut berupa sarana kesehatan, pendidikan dan pemerintahan itu sendiri yang berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada sarana pendidikan Desa Karangagung sudah memiliki sekolah dari tingkatan PAUD sampai SMA, sayangnya hanya beberapa sekolah saja yang merupakan sekolah negeri sedangkan sekolah swasta jauh lebih banyak, sekolah negeri yang ada di Desa Karangagung hanya ada pada tingkatan dasar/SD. Meski demikian masyarakat desa tidak perlu jauh0jauh menyekolakan anak mereka karena sarana pendidika di desa sudah cukup memadai.

Sarana prasarana kesehatan di Desa Karangagung yang difasilitasi oleh pemerintah desa adalah 1 unit puskesmas dan 6 unit posyandu yang tersebar secara

merata di seluruh desa, yang mana sarana kesehatan tersebut merupakan sarana kesehatan gratis bagi masyarakat. Selain sarana kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah desa, terdapat juga beberapa sarana kesehatan yang dimiliki oleh penduduk itu sendiri, seperti rumah praktek bidan dan rumah praktek dokter. Selain tempat pengobatan, di Desa Karangagung juga terdapat apotik yang menyediakan kebutuhan obat dari masyarakat Desa Karangagung. Sedangkan sarana keagamaan berupa masjid dan mushola, karena pada desa Karangagung sulit sekali ditemukan masyarakat dengan pemeluk agama non-muslim maka di Desa Karangagung tidak ada tempat peribadatan lain selain masjid dan mushola. Meskipun demikian, masyarakat memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi terhadap pemeluk agama lain, hal ini dibuktikan dari besarnya partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari raya waisak di Kabupaten Tuban.

Sarana prasarana umum di Desa Karangagung berupa sarana perdagangan, desa karangagung merupakan salah satu penghasil terasi udang ataupun ikan terbesar di Kabupaten Tuban karena memiliki letak geografis yang bersebalahan langsung dengan laut utara pulau Jawa. Sarana umum lainnya adalah adanya pasar yang sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, alun-alun sebagai tempat pedagang kecil berjualan, serta di Desa Karangagung juga terdapat 2 minimarket yaitu indomaret. Adapun sarana lain seperti koperasi yang menjadi rujukan bagi beberapa warga untuk meminjam modal usaha.

Pengelolaan Alun-alun Oleh BUMDES Bahari Sejahtera

Desa karangagung memiliki ikon yang cukup unik yang membedakannya dengan desa-desa lain di Kabupaten Tuban, yaitu alun-alun desa karangagung. Alun-alun ialah merupakan suatu lapangan terbuka yang biasa digunakan masyarakat dalam berbagai aktifitas yang beragam. Berdasarkan pendapat Haryoto (1986:386), pada dasarnya alun-alun itu halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana camat dan bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikhwal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan. Karena itu alun-alun bisa beralih fungsi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk sekedar berolahraga, menghabiskan waktu luang dan sebagainya di alun-alun. Alun-alun desa Karangagung sendiri dijadikan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima, serta tempat berlangsungnya acara yang diadakan

oleh pemerintah desa seperti senam bersama, bazar, kegiatan dan sebagainya.

Alun-alun desa karangagung terbentuk dari adanya program bursa inovasi desa. Bursa inovasi desa merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa dalam lingkup kabupaten. Tujuan dari adanya busra inovasi desa adalah untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa dalam menemukan solusi dari penyelesaian suatu masalah, serta sebagai alternative bagi kegiatan pembangunan desa dalam pengelolaan dan desa agar lebih efektif. Pembangunan alun-alun desa karangagung sendiri sebenarnya merupakan agenda dari kepala desa periode sebelumnya namun baru dapat terealisasi pembangunan pada periode ini, dapat dikatakan juga bahwa realisasi pembangunan alun-alun merupakan janji dari kepala desa yang terpilih kepada kepala desa periode sebelumnya.

Alun-alun desa Karangagung diresmikan oleh Bupati Tuban pada 27 Oktober 2020, yang disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tuban, Camat, Forkopimka Palang, serta Kepala desa dan perangkat desa Karangagung. Menurut kepala desa Karangagung, adanya alun-alun menjadi harapan menjadi ikon desa yang mendeskripsikan warga yang bekerja sebagai nelayan, selain itu adanya alun-alun juga mampu meningkatkan ekonomi warga. Selain itu Bupati Kabupaten Tuban juga berpendat pada acara peresmian alun-alun desa karangagung yang dilansir dari blok Tuban.com bahwa, alun-alun desa karangagung merupakan wujud kepedulian dan keberhasilan dari kepala desa, perangkat desa serta dukungan dari masyarakat sehingga alun-lun desa karangagung mampu menjadi ikon yang multi fungsi selain sebagai tempat rekreasi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Alun-alun Desa Karangagung diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2020. Sejak diresmikannya alun-alun pada tanggal 27 Oktober 2020, Kepala Desa Karangagung telah memberikan wewenang penuh kepada BUMDES Bahari Sejahtera untuk menjadi penanggung jawab pengelolaan alun-alun. BUMDES Bahari Sejahtera merupakan lembaga usaha ekonomi Desa Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, BUMDES Bahari Sejahtera didirikan pada tanggal 29 Desember 2017 melalui forum Musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga desa lainnya, dan perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

BUMDES Bahari Sejahtera merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah desa karangagung karena itu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dari

manajemen dan staff karyawan berkomitmen menjalankan dan mewujudkan visi dan misi BUMDES Bahari Sejahtera Desa Karangagung. VISI dari BUMDES sendiri adalah “Meningkatkan pendapatan asli desa melalui bumdesa karangagung”. Kemudian terdapat enam misi yang ingin diwujudkan oleh BUMDES Bahari Sejahtera diantaranya adalah 1) Meningkatkan pendapatan asli desa, 2) Mengembangkan perekonomian desa, 3) Meningkatkan modal usaha BUMDES, 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, 5) Meningkatkan pengelolaan asset desa, 6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa.

BUMDES Bahari Sejahtera merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang usaha lingkup desa. Adapun unit usaha selingkup alun-alun yang dikelola oleh BUMDES Karangagung diantaranya adalah, pengelolaan gedung serbaguna, gedung serbaguna alun-alun Desa Karangagung menjadi jasa penyewaan untuk sarana kegiatan olahraga, kesenian, pernikahan, dan pertemuan dalam skala besar lainnya. Unit usaha E-Warung, bergerak dibidang jasa layanan transaksi online dan menjual kebutuhan sarana olahraga. Unit usaha kios, los dan lapak alun-alun, menambah peluang usaha baru guna meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjadikan taman wisata warga.

Penyewaan ruko di alun-alun desa karangagung terdapat beberapa kategori yang akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Kategori Ruko Alun-alun Desa Karangagung berdasarkan Harga Sewa

No.	Kategori	Harga Sewa
1.	Blok A	Rp.4.000.000/tahun
2.	Blok B	Rp.3.500.000/tahun
3.	Blok C	Rp.2.000.000/tahun
4.	Blok D	Rp.1.750.000/tahun
5.	Loss	Rp.300.000/bulan

Kategori-kategori yang tertera pada tabel 1 tersebut dibuat berdasarkan tempat ruko tersebut berada, semakin strategis ruko yang disewakan maka semakin tinggi harga sewa yang harus dibayar. Kategori loss pada no. 5 merupakan penyewaan tempat yang berada di halaman alun-alun, masyarakat yang berjualan pada kategori loss tidak memiliki ruko dan hanya berjualan di halaman alun-alun saja. Kategori-kategori tersebut dibuat agar masyarakat tidak saling berebut untuk mendapatkan tempat yang strategis sebagai tempat jualan mereka, dengan adanya kategori maka masyarakat akan bisa memilih tempat ruko berdasarkan kemampuan sewa mereka. Adapun uang kebersihan yang harus dibayarkan sebesar Rp.10.000 yang harus dibayarkan setiap ruko buka untuk menjamin kebersihan dan kenyamanan alun-alun.

Strategi merupakan upaya atau cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Marrus (2002) strategi ialah aksi potensial yang memerlukan keputusan to manajemen dan sumber daya organisasi pada skala besar. Dalam penelitian

ini sendiri strategi yang dimaksud adalah strategi yang dilakukan oleh kepala desa karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun. Strategi kepala desa karangagung dapat dilihat dari upaya-upaya ataupun cara yang dilakukan oleh kepala desa dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, mulai dari penyusunan program kerja sampai tahap pelaksanaan program kerja tersebut.

Pemberdayaan masyarakat ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan kelompok rentan agar kembali berdaya, dalam hal ini adalah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Karangagung, pemerintah desa berharap bahwa program pemberdayaan yang dilakukan dapat memuat setidaknya empat prinsip diantaranya adalah kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Aji selaku kepala desa dalam wawancara sebagai berikut.

“pemberdayaan masyarakat melalui alun-alun ini merupakan ikhtiar dari pemerintah desa untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena itu kami berharap program pemberdayaan yang dilakukan ini dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat, selain itu kesetaraan dan partisipasi antar masyarakat juga sangat dibutuhkan agar program pemberdayaan ini dapat menjadi program yang berkelanjutan dan dapat terus berjalan meskipun program telah selesai dilaksanakan.” (wawancara pada 28 April 2021)

Prinsip kesetaraan yang dimaksud dalam wawancara tersebut adalah bahwa diantara masyarakat dan petugas pemberdayaan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya berada pada posisi dan kedudukan yang setara. Meskipun dalam program pemberdayaan petugas sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek namun hal tersebut diharapkan tidak membuat salah satu diantaranya merasa lebih superior atau inferior. Kepala Desa Karangagung berharap diantara petugas dan masyarakat mampu membuat hubungan yang setara sehingga terjadi proses saling belajar diantara keduanya, dengan adanya rasa setara antara kedudukan petugas dengan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan menyenangkan selama proses pemberdayaan berlangsung. Pemerintah desa percaya apabila diantara petugas dan masyarakat terdapat prinsip kesetaraan maka partisipasi juga akan turut meningkat karena adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara keduanya.

Beberapa tujuan utama dari adanya pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberdayakan kelompok rentan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu bersaing dalam masyarakat, dan turut berpartisipasi dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu Kepala Desa

Karangagung berharap dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan alun-alun ini mampu memandirikan masyarakat, dan bukan menganggap bahwa program pemberdayaan yang dilakukan hanyalah bantuan dari pemerintah desa semata, karena tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah menjadikan masyarakat semakin malas untuk berusaha dan hanya berpangku tangan menunggu bantuan datang. Adanya program pemberdayaan diharapkan mampu mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan tidak bergantung dengan pihak manapun. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara terus menerus dan masyarakat sudah mulai menjalankan usahanya sendiri tanpa bantuan petugas. Pada prinsip ini Kepala Desa Karangagung berharap bahwa program pemberdayaan yang dilakukan akan benar-benar membuat masyarakat berdaya serta mampu menjalankan usahanya secara mandiri sehingga tujuan utama dari program pemberdayaan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dapat tercapai.

Program pemberdayaan masyarakat tidak dapat berlangsung tanpa adanya kesediaan masyarakat dalam mengikuti program. Karena itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat bersedia untuk mengikuti program serta bersedia menjadi pedagang di alun-alun adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. Namun tanpa disangka masyarakat sangat antusias untuk mengikuti program dan saling berebut untuk menjadi pedagang di alun-alun Desa Karangagung. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Aji selaku Kepala Desa Karangagung dalam wawancara sebagai berikut.

“program pemberdayaan melalui berdagang di alun-alun mendapat tanggapan yang sangat luar biasa dari masyarakat, karena masyarakat sendiri pada saat itu mengalami kesulitan ekonomi sehingga saat pemerintah desa menawarkan lapangan pekerjaan mereka langsung menyambutnya dengan baik. Tidak ada paksaan sama sekali dalam melakukan program ini, justru sebaliknya pemerintah desa kewalahan menanggapi tingginya minat masyarakat sampai ada yang berebut karena fasilitas yang kami sediakan sangat terbatas. Sehingga yang dipilih untuk mengikuti program pemberdayaan adalah yang tercepat mendaftar dan menyelesaikan proses administrasi.” (wawancara pada 28 April 2021)

Pemberdayaan merupakan sesuatu yang tidak bisa terbentuk sendiri secara alami namun memerlukan upaya-upaya serta peran aktif dari berbagai pihak agar proses pemberdayaan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi kepala desa karangagung dalam

melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan diantaranya adalah tahap persiapan, perencanaan, penyuluhan, pelaksanaan, evaluasi, dan tahapan yang terakhir adalah terminasi yang mana dalam setiap tahapan tersebut dilakukan dengan cukup atang agar tujuan pemberdayaan dapat dicapai dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Pembentukan Pengurus serta Penyediaan Tempat Pemberdayaan

Tahapan pertama yang dilakukan oleh kepala desa karangagung dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tahapan persiapan. Persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seseorang sebelum memulai sesuatu. Pada tahap ini seseorang mulai menyiapkan segala keperluan mendasar mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal utama yang paling dibutuhkan adalah menyiapkan petugas pemberdayaan serta menyiapkan tempat pelaksanaan untuk berlangsungnya proses pemberdayaan agar berjalan sesuai yang dikehendaki. Kedua hal tersebut menjadi hal yang paling mendasar karena tanpa adanya petugas dan lapangan kegiatan, maka proses pemberdayaan masyarakat tidak dapat berjalan.

Pada tahap persiapan, terdapat dua hal yang disiapkan oleh Kepala Desa Karangagung yaitu menyiapkan petugas sebagai tenaga pemberdayaan masyarakat dan menyiapkan lapangan atau wadah dalam melakukan pemberdayaan. Tenaga pemberdayaan berperan sebagai petugas selama proses pemberdayaan berlangsung, mulai dari penyuluhan sampai pendampingan terhadap masyarakat. Petugas yang disiapkan dalam proses pemberdayaan adalah staff BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang mana BUMDES tersebut menjadi subyek atau pemberdaya yang mengatur dan mengelola jalannya program pemberdayaan. Kemudian lapangan atau wadah dalam melakukan pemberdayaan dilakukan di alun-alun Desa Karangagung, dimana alun-alun tersebut yang akan menjadi sarana atau wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi dirinya dalam berjualan. Alun-alun dipilih sebagai wadah pemberdayaan karena alun-alun tersebut yang nantinya akan menjadi tempat usaha bagi masyarakat, sehingga setelah proses pemberdayaan selesai maka masyarakat tinggal melanjutkan apa yang telah dipelajari selama proses pemberdayaan berlangsung, pemilihan alun-alun sebagai lokasi pemberdayaan juga agar masyarakat terbiasa dan tidak perlu bergantung lagi dengan petugas setelah tahap terminasi. Hal ini senada dengan pernyataan bapak Aji selaku kepala desa karangagung pada hasil wawancara sebagai berikut.

“pada proses persiapan pemberdayaan, hal pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ialah dengan menyiapkan petugas yaitu staff BUMDES bahari sejahtera sebagai penanggung jawab serta melakukan pendampingan kepada masyarakat selama proses pemberdayaan berlangsung. Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan petugas pemberdayaan, karena semuanya diserahkan kepada BUMDES. Kemudian selain petugas, pemerintah desa juga mempersiapkan tempat pemberdayaan yaitu di alun-alun, alasan pemerintah desa memilih alun-alun untuk digunakan sebagai wadah pemberdayaan adalah agar warga dapat cepat beradaptasi dan tidak terlalu bergantung kepada petugas ketika pemberdayaan telah selesai.” (wawancara pada 28 April 2021)

Pernyataan kepala desa tersebut senada dengan pernyataan Ibu Kusnul selaku staff BUMDES Bahari Sejahtera sekaligus petugas pemberdayaan, dalam wawancara sebagai berikut.

“BUMDES bahari sejahtera mendapatkan amanah dari kepala desa untuk mengelola alun-alun Desa Karangagung sekaligus menjadi penanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat selama proses pemberdayaan berlangsung sampai berhentinya program. Selain itu kami juga diamanati oleh kepala desa untuk mengurus seluruh usaha yang berada di lingkup alun-alun menjadi tanggung jawab bum desa bahari sejahtera.” (wawancara pada 03 Mei 2021)

Petugas pelaksana program pemberdayaan adalah seluruh staff BUMDES Bahari Sejahtera, selain sebagai petugas pengawas proses berlangsungnya pemberdayaan, BUMDES juga bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang mengikuti program, serta mengelola alun-alun Desa Karangagung. Jadi tidak ada aturan khusus dalam perekrutan petugas pemberdayaan karena yang menjadi petugas adalah seluruh staff BUMDES Bahari Sejahtera.

Perencanaan Program melalui Musyawarah dengan Masyarakat

Tahapan kedua dalam mewujudkan program pemberdayaan adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses penyusunan program seperti apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, memikirkan alternative program apabila program unggulan tidak dapat dilaksanakan, serta bagaimana cara mengatasi masalah apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Pada tahap perencanaan, petugas atau subyek secara partisipatif melibatkan warga untuk berfikir mengenai program apa saja yang akan dan mampu untuk dilakukan oleh masyarakat, serta memikirkan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi dan bagaimana cara

mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahap ini diharapkan masyarakat dapat turut aktif memikirkan sebagian program dan aktivitas yang dapat dilakukan, karena program yang akan berlangsung adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada tahap perencanaan, Kepala Desa Karangagung beserta pemerintah desa mengundang masyarakat ke balai desa untuk mendiskusikan program atau aktivitas apa saja yang akan dilakukan di alun-alun. Pada hasil diskusi tersebut disepakati hasil bahwa masyarakat akan dibangun ruko dengan biaya sewa yang terjangkau agar masyarakat dapat memiliki lahan untuk berjualan, namun tidak khawatir dengan biaya sewa yang mahal. Dari hasil musyawarah juga disepakati bahwa biaya sewa ruko tergantung seberapa strategis tempat ruko tersebut dari jangkauan pembeli. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Aji selaku Kepala Desa Karangagung dalam wawancara sebagai berikut.

“setelah mempersiapkan petugas pendampingan bagi masyarakat, pemerintah desa kemudian mengundang masyarakat yang telah terdaftar sebagai penyewa ruko untuk menjadi pedagang di alun-alun desa. Kami mengajak masyarakat untuk berdiskusi tentang jalannya program pemberdayaan mulai dari penyuluhan, pendampingan, sampai tahap pelepasan atau berakhirnya program pemberdayaan nanti. Dari hasil diskusi disepakati bahwa penyuluhan akan dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu minggu. Kami juga menyepakati bahwa biaya sewa ruko tergantung seberapa strategis tempat ruko tersebut dari jangkauan pembeli.” (wawancara pada 28 April 2021)

Pada tahap ini pemerintah desa juga mendapati masalah yaitu, terbatasnya lahan di alun-alun desa tidak mampu menampung besarnya antusias warga dalam mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa tidak mampu memberikan ruko sebanyak jumlah permintaan masyarakat karena keterbatasan lahan, sehingga disepakati bahwa masyarakat yang tidak kebagian ruko masih diijinkan untuk berjualan disekitar halaman alun-alun, namun dengan waktu yang terbatas yaitu hanya pada sore sampai malam hari karena halaman alun-alun juga kadang digunakan kegiatan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang menyewa gedung. Hal ini dijelaskan oleh bapak Aji selaku kepala desa karangagung dalam pernyataan sebagai berikut.

“kami tidak menyangka bahwa program pemberdayaan yang akan dilaksanakan mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat sampai banyak dari masyarakat yang berebut untuk mendapatkan ruko, namun karena keterbatasan kami, kami hanya memberi pada yang pertama mendaftar, sehingga banyak masyarakat yang mengusulkan dan meminta

untuk diberikan izin berjualan di alun alun meskipun tidak kebagian ruko sehingga kami menyepakati bahwa mereka tetap diijinkan berjualan namun dalam kurun waktu yang terbatas.” (wawancara pada 28 April 2021)

Masyarakat yang tidak kebagian ruko tetap diijinkan untuk berjualan di halaman alun-alun namun dalam kurun waktu yang terbatas, yaitu antara sore sampai malam hari saja, karena halaman alun-alun juga kadang digunakan oleh pemerintah desa untuk melakukan kegiatan desa selain itu pada siang hari halaman alun-alun juga kadang digunakan untuk tempat parkir kendaraan dari masyarakat yang memiliki kegiatan di alun-alun seperti pesta pernikahan, kegiatan olahraga senam dan futsal, dan kegiatan lain sebagainya. Masyarakat yang berjualan di halaman alun-alun tetap membayar uang sewa dan termasuk dalam kategori loss.

Penyuluhan terhadap Target Pemberdayaan mengenai Pengelolaan Ruko

Tahapan ketiga dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penyuluhan. Setelah persiapan dan perencanaan program pemberdayaan dirasa sudah cukup matang, selanjutnya pemerintah Desa Karangagung berupaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan ekonomi. Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya (Subejo, 2010). Dengan kata lain penyuluhan merupakan proses pengajaran terhadap masyarakat agar mereka paham dan mampu melakukan perubahan terhadap dirinya. Penyuluhan diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat, sehingga masyarakat akan mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri.

Pada tahapan memberikan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satu hal yang paling penting ialah dengan memberi pelatihan atau penyuluhan. Hal ini dirasa penting untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan ruko. Pada tahap ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang mulanya tidak mengetahui apapun tentang cara berdagang setelah dibekali dengan ilmu-ilmu dasar mengenai cara mengelola ruko, masyarakat mampu mengelola usahanya sendiri, penyuluhan tersebut dilakukan di alun-alun Desa Karangagung yang telah disiapkan sebagai tempat berlangsungnya program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pemaparan bu kusnul selaku staff BUMDES Bahari Sejahtera dalam wawancara sebagai berikut.

“Pada tahap penyuluhan ini, pemerintah desa dibantu BUMDES berupaya memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai cara menentukan produk yang akan dijual, penentuan laba, serta pemutaran modal agar toko akan terus berjalan. Penyuluhan ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu minggu dalam jangka waktu satu bulan. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin, dengan staff BUM Desa sebagai pemateri.” (wawancara pada 03 Mei 2021)

Menurut Kepala Desa Karangagung, meskipun waktu yang dilakukan untuk penyuluhan sangat singkat namun hal tersebut telah dirasa cukup bagi masyarakat karena prosesnya yang menyenangkan sehingga masyarakat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu adanya rasa kesetaraan antara petugas dengan masyarakat membuat masyarakat tidak enggan untuk bertanya, sehingga terjadi proses saling belajar antara petugas dengan masyarakat.

Upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah desa karangagung dalam menyiapkan masyarakat agar siap untuk mengikuti program pemberdayaan yaitu persiapan, perencanaan, dan penyuluhan, setelah ketiga tahap tersebut dirasa cukup maka tahapan keempat adalah pelaksanaan atau implementasi program pemberdayaan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan yang telah dirumuskan, peran masyarakat sebagai objek pemberdayaan diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini kerjasama antara pengelola dan masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pelaksanaan pemberdayaan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Implementasi Program Pemberdayaan dan Evaluasi Rutin Setiap Minggu

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini keterlibatan masyarakat diharapkan lebih dominan. Pada tahap ini masyarakat sebagai objek pemberdayaan mulai dilepaskan untuk membuka dan mengelola usaha masing-masing, namun peran pengelola atau subyek pemberdayaan masih diperlukan sebagai pendampingan. Pada tahap pelaksanaan masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan sudah mulai diperbolehkan untuk mulai menjual produk yang ditawarkan. Pengelola atau subyek hanya memantau aktivitas masyarakat namun tetap memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Kusnul selaku Staff BUMDES Bahari Sejahtera dalam wawancara sebagai berikut.

“pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berlangsung pada hari senin tanggal 28

September 2020. Pada tahap pelaksanaan ini petugas cenderung lebih pasif karena manajemen ruko dilakukan secara penuh oleh masyarakat selaku pemilik ruko itu sendiri, pengelola hanya memantau saja dari jauh dan memberikan bantuan secukupnya kepada peserta pemberdayaan yang mengalami kesulitan.” (wawancara pada 03 Mei 2021)

Selama proses pelaksanaan program berlangsung, petugas pemberdayaan hanya memantau saja sedangkan masyarakat sendirilah yang mengatur dan menjalankan rukonya. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut, juga dibarengi dengan evaluasi program setiap minggunya. Evaluasi merupakan suatu kegiatan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan dari suatu program. Evaluasi penting untuk dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan dari program yang telah dikembangkan, serta menganalisa masalah-masalah yang dihadapi selama tahap pelaksanaan untuk meminimalisir kegagalan yang terjadi di masa depan.

Pada proses pemberdayaan, evaluasi harus dilakukan oleh petugas dan masyarakat agar keduanya saling memahami kekurangan masing-masing, masyarakat harus dilibatkan dalam proses evaluasi karena masyarakat dalam hal ini adalah pelaksana program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah desa. Disamping itu pemberdayaan juga bertujuan untuk memandirikan masyarakat, karena itu apabila masyarakat mampu mengevaluasi kekurangannya maka dimasa depan mereka akan mampu menjalankan usahanya secara mandiri serta mampu mengatasi permasalahan yang terjadi tanpa bantuan dari pengelola. Proses evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangagung dijelaskan oleh Ibu Kusnul selaku staff Bum Desa Bahari Sejahtera dalam wawancara sebagai berikut.

“proses evaluasi dilakukan secara rutin pada hari minggu. Evaluasi dilakukan oleh staff BUMDES dan masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan, kekurangan yang ada pada satu minggu sebelumnya didiskusikan bersama untuk dilakukan perbaikan pada minggu berikutnya. Tahap evaluasi ini rutin dilakukan setiap minggu dan berhenti pada minggu ke empat karena dirasa masyarakat sudah mampu menjalankan usahanya sendiri tanpa dampingan dari pengelola program pemberdayaan.” (wawancara pada 03 Mei 2021)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apa saja kekurangan yang terjadi selama proses pelaksanaan program. Setelah mengetahui apa saja yang kurang selama pelaksanaan program maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan program keesokan harinya agar kesalahan pada hari sebelumnya tidak terjadi lagi.

Teriminasi Program Pemberdayaan

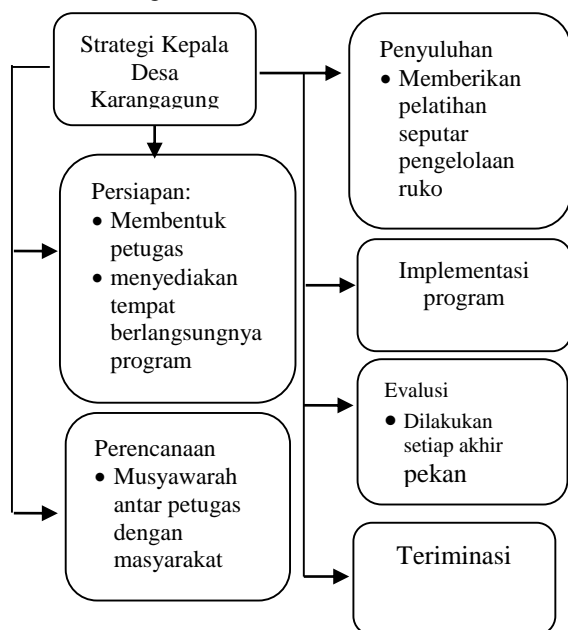
Tahapan terakhir dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ialah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, dengan kata lain tahap terminasi adalah tahap perpisahan antara pengelola dengan masyarakat karena program pemberdayaan telah selesai dilakukan. Artinya pada tahap ini masyarakat sudah tidak butuh lagi pendampingan dari petugas atau pengelola, sehingga program pemberdayaan harus dihentikan karena masyarakat sudah dianggap mampu atau berdaya dalam mengelola usahanya sendiri. Tolak ukur kemampuan masyarakat dilihat dari masyarakat yang sudah terbiasa mengelola ruko miliknya serta mampu mengatasi masalah yang terjadi tanpa bantuan dari petugas ataupun pengelola.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung dianggap berhasil karena telah mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memberdayakan masyarakat untuk berjualan. Hal ini sesuai dengan pemaparan bapak adji selaku kepala desa karangagung dalam wawancara sebagai berikut.

“proses pemberdayaan dihentikan bertepatan dengan peresmian gedung alun-alun desa yang berlangsung pada 27 Oktober 2020. Diresmikannya gedung alun-alun juga menjadi tanda bahwa masyarakat sudah dianggap berdaya dan mampu menjalankan usahanya sendiri, sehingga program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung dapat dikatakan berhasil karena dengan berdayanya masyarakat dalam mengelola usaha, masyarakat juga jadi memiliki penghasilan tambahan selain menggantungkan pendapatan dari hasil laut sehingga kesejahteraan masyarakat pun turut meningkat.”

Peresmian gedung alun-alun Desa Karangagung pada 27 Oktober 2020 menjadi symbol bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa telah berakhir. Dengan diresmikannya alun-alun, maka telah resmi pula para masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan untuk menjadi pedagang di alun-alun. Keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung ditandai dengan tercapainya tujuan utama dari program tersebut, yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Desa Karangagung melalui berjualan di alun-alun sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan berakhirnya program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa juga berharap agar masyarakat semakin berkembang usahanya, sehingga mereka mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, maka strategi kepala desa dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun dapat dicermati dari bagan di bawah,



Bagan 1. Strategi Kepala Desa Karangagung Dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Aalun-Alun

Dukungan Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Karangagung

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama sehingga menciptakan rasa saling memiliki. Kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi perubahan sosial, karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam segala pengambilan keputusan untuk mengontrol segala perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mendatang. Pada negara dengan system demokrasi dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap proses penarikan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, karena masyarakat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dukungan masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program, semakin banyak dukungan masyarakat maka semakin besar peluang keberhasilan dari program tersebut. Pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh kepala Desa Karangagung, dukungan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting karena program pemberdayaan membutuhkan banyak partisipasi dari masyarakat selaku objek dari pemberdayaan.

Dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Karangagung dijelaskan dengan tabel presentase peran serta masyarakat dalam pembangunan yang didapat dari data di kantor desa Karangagung.

Tabel 3. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Ekonomi

No.	Kegiatan	Prosentase
1.	Jumlah musyawarah perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat	4 kali
2.	Jumlah kehadiran masyarakat pada setiap kali musyawarah	90%
3.	Jumlah peserta laki-laki	75%
4.	Jumlah peserta perempuan	25%

Berdasarkan data yang diperoleh dari kanto Desa Karangagung menunjukkan bahwa terdapat jumlah musyawarah perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanyak empat kali, yang mana dalam musyawarah tersebut jumlah kehadiran masyrakat setiap kali musyawarah sebanyak. 90% dengan jumlah prosentase peserta lai-laki sebanyak 75% dan jumlah peserta perempuan sebanyak 25%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Karangagung mengenai peranserta masyarakat dalam perencanaan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat tinggi. Dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung juga dapat dilihat dalam partisipasi masyarakat selama proses pemberdayaan berlangsung. Data tersebut juga didukung oleh pemaparan dari bapak adji selaku kepala desa karangagung dalam wawancara sebagai berikut.

“program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ini mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Masyarakat turut berpartisipasi selama program berlangsung mulai dari perencanaan sampai berakhirnya program. Banyak juga masukan dari masyarakat yang kami tampung seperti perijinan dagang di halaman alun-alun bagi masyarakt yang tidak memiliki ruko. Suksesnya program pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh pemdes ini juga dapat dikatakan berhasil karena tingginya partisipasi dari masyarakat” (wawancara pada 28 April 2021)

Strategi kepala desa Karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya tentu saja tidak luput dari dukungan masyarakat serta besarnya partisipasi masyarakat selama proses pemberdayaan berlangsung. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berhasil karena pemerintah desa telah mampu

mencapai tujuan dari dibentuknya program pemberdayaan itu sendiri yaitu, memandirikan masyarakat dalam mengelola usaha, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat karena telah memberikan peluang usaha sebagai alternative usahanya.

Desa Karangagung merupakan salah satu desa di Kabupaten Tuban yang berbatasan langsung dengan pantai utara Pulau Jawa, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dengan pendapatan yang tidak pasti setiap harinya yang mana hal tersebut mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat di desa karangagung. Karena itu pemerintah desa karangagung berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Strategi kepala desa dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun dapat dianalisis menggunakan teori structural functional menurut Parsons yang dikenal dengan skema AGIL. AGIL merupakan suatu fungsi kompleks suatu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Parsons percaya bahwa ada empat imperative fungsional yang harus ada dalam sebuah system yaitu *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, *latency*.

Pertama yaitu *adaptation*, memiliki arti sebuah sistem harus mengatasi kebutuhan yang bersifat situasional dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Pada penelitian ini kepala desa karangagung berupaya untuk mengatasi kebutuhan ekonomi masyarakat yang tergolong rendah, dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun. Kemudian pemerintah desa karangagung berupaya mengadaptasikan program pemberdayaan tersebut dengan kebutuhan masyarakat yaitu dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan melalui penyuluhan mengenai cara berdagang agar masyarakat mampu dan berdaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu agar masyarakat dapat cepat mengadaptasikan diri dengan lingkungan kerja baru, pemerintah desa karangagung menjadikan alun-alun desa sebagai tempat berlangsungnya program pemberdayaan, yang mana alun-alun tersebut yang nantinya akan menjadi tempat usaha baru bagi masyarakat untuk berjalan.

Kedua yaitu *goal attainment*, memiliki arti yaitu tujuan yang akan dicapai. Fungsi dari *goal attainment* adalah dalam mengoptimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan utama dari adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan alun-alun yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangagung adalah untuk memberdayakan kelompok masyarakat dengan ekonomi

rendah agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memiliki keterampilan dalam berdagang. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa berharap masyarakat memiliki usaha sampingan sehingga mereka tidak akan terlalu menggantungkan kehidupan pada pendapatan laut yang tidak pasti, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat untuk mencapai tujuan adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai pengelolaan ruko agar masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman mengenai berdagang juga mampu mengikuti program dengan baik.

Ketiga yaitu *integration*, memiliki arti integrasi yang mana sebuah system harus memberikan peraturan antara hubungan bagian-bagian dari komponennya. Dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung, integritas antara pengelola dengan masyarakat berjalan dengan baik. Kepala Desa Karangagung menegaskan bahwa diantara petugas dengan masyarakat memiliki posisi yang sama tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, dengan begitu diharapkan proses pemberdayaan akan berlangsung dengan baik dan menyenangkan sehingga terjadi proses saling belajar. Integritas yang baik antara masyarakat dengan petugas dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Karangagung dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat selama program berlangsung.

Keempat yaitu *latency*, memiliki arti sebuah sistem harus menyelenggarakan, memelihara, dan meng *update* baik motivasi para personal atau pola-pola budaya yang membentuk dan menunjang motivasi itu. Pemerintah desa karangagung dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupaya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memiliki penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan pula kesejahteraan masyarakat akan turut meningkat seiring dengan semakin mandiri masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan bahasan yang telah dipaparkan, maka strategi kepala desa karangagung dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan berkelanjutan. Serta dalam proses pemberdayaan masyarakat strategi yang dilakukan oleh kepala Desa Karangagung adalah, pengelolaan alun-

alun yang dilakukan oleh BUMDES Bahari Sejahtera, pembentukan pengurus serta penyediaan tempat pemberdayaan, perencanaan program melalui musyawarah dengan masyarakat, penyuluhan terhadap target pemberdayaan, implmentasi program pemberdayaan dan evaluasi rutin setiap minggu.

Dukungan masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh kepala Desa Karangagung menunjukkan antusias yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dari tingginya partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai berakhirnya program. Program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung dapat dikatakan berhasil karena dengan berdayanya masyarakat dalam mengelola usaha, masyarakat juga jadi memiliki penghasilan tambahan sehingga kesejahteraan masyarakat pun turut meningkat.

Saran

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangagung dianggap cukup berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun karena terbatasnya lahan menyebabkan tidak semua masyarakat yang berminat dalam program tersebut memiliki kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan. Hendaknya pemerintah Desa Karangagung memperluas lagi cakupan pemberdayaan agar seluruh masyarakat yang berminat dalam program pemberdayaan dapat turut berpartisipasi. Diharapkan pemerintah desa dapat memperluas lagi pembangunan ruko di alun-alun desa karangagung dan menambah lapangan peerjaan bagi masyarakat agar semakin banyak pula masyarakat yang memiliki usaha sampingan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, H. W. 2015. Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES). (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum) (BPAM) Di Desa Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Publika*. Vol 3 (5). Hal 9.
- Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi* Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2005.
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, cet- 14, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Ginanjari Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas.1996.
- Glueck, W.F. dan Lawrence, R.J. 1989. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Edisi Ketiga. Terjemahan Murad dan Henry Sitanggang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif AlQur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Jafar Hafisah, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Iri Pres, 2006.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Kapita, F., Kaawoan, J. E., Lengkon, J. P. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Eksekutif*. Vol 1. Hal 4-6.
- Kunto, Haryoto. 1984. *Waja Bandoeng Tempo Doeloe*. Granesia.
- Kusuma, E. 2019. *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa Bringin Kecamatan Montong Kabupaten Tuban*. (Doctoral Dissertation, Universitas Bojonegoro).
- K, Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali press: Jakarta
- Maulana, M. 2019. *Strategi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Tanjung Pasir Kuecamatan Kualuhu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara*, (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
- Moleong, L. J. 2009. *Metode Penelitan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najiati, Sri,dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: wetlands Internasional.
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. 2008. *Manajemen Strategis 10*. Salemba Empat : Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Pranaka, Prijono Onny, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS.1996.
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.
- Tjiptono, Fandy, 2006. *Manajemen Pelayanan Jasa*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjajanti, K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12 (1). Hal 15-27
- Susanti. W. D. 2015. Identifikasi Pemanfaatan Alun-alun Malang. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*. Vol 7 (2). Hal 28.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.